

PERIMBANGAN KEUANGAN PUSAT DAERAH

(PENGEMBANGAN POTENSI KEUANGAN DAERAH DI KABUPATEN TUBAN
DALAM RANGKA PELAKSANAAN UU NO. 25/1999)

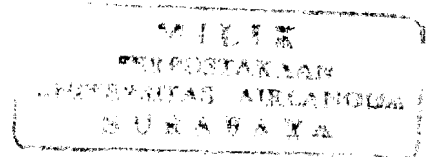
SKRIPSI

KK

Feb. P. 05/04

Man

P.



OLEH :

MART LAM M MANIHURUK

NIM : 079915958

PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

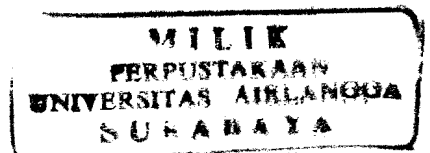
2003

PERIMBANGAN KEUANGAN PUSAT DAERAH

**(PENGEMBANGAN POTENSI KEUANGAN DAERAH DI KABUPATEN TUBAN
DALAM RANGKA PELAKSANAAN UU NO. 25/1999)**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Melengkapi Tugas-Tugas Dan
Memenuhi Salah Satu Syarat Dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



OLEH :

MART LAM M MANIHURUK

NIM : 079915958

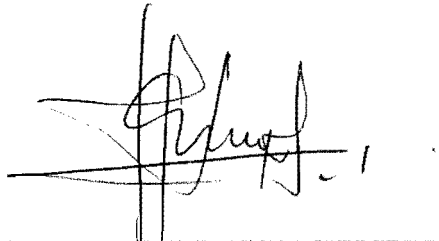
**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS AIRLANGGA
S U R A B A Y A**

2003

LEMBAR PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI UNTUK DIUJI

MENYETUJUI DOSEN PEMBIMBING

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dwi Windyastuti', is written over a horizontal line.

Dra. DWI WINDYASTUTI, MA
NIP 131.801.643

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

PERIMBANGAN KEUANGAN PUSAT DAERAH

**(Pengembangan Potensi Keuangan Daerah di Kabupaten Tuban Dalam
Rangka Pelaksanaan UU No. 25/1999)**

DISUSUN OLEH : MART LAM M MANIHURUK

NIM : 079915958

**TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN TIM PENGUJI PADA
TANGGAL 13 OKTOBER 2003 DAN TELAH DINYATAKAN
TELAH MEMENUHI SYARAT UNTUK DITERIMA**

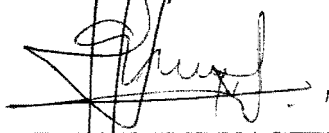
TIM PENGUJI

KETUA



Drs. WISNU PRAMUTANTO, M.Si
NIP 131.453.124

ANGGOTA PENGUJI I



Dra. DWI WINDYASTUTLMA
NIP 131.801.643

ANGGOTA PENGUJI II



Dra. SITI AMINAH, MA
NIP 131.836.624

ABSTRAK

Penelitian ini berfokus pada pengembangan potensi keuangan daerah dan implemetasi perimbangan keuangan pusat-daerah. Pemberlakuan UU No. 25/1999 merupakan bentuk dari penyerahan kewenangan pada daerah untuk mengembangkan potensi keuangan daerah. Permasalahan pertama yang dibahas dalam tulisan ini tentang potensi keuangan apakah yang digali PemKab Tuban untuk menambah Pendapatan Asli Daerah dalam rangka implementasi otonomi daerah sesuai dengan UU No. 25/1999 dan hambatan-hambatan apakah yang muncul dalam penggalian potensi keuangan daerah di Kabupaten Tuban. Kedua bagaimana implementasi perimbangan keuangan pusat-daerah di Pemkab Tuban dalam rangka otonomi daerah sesuai dengan UU No. 25/1999. Dengan kedua rumusan masalah tersebut maka diharapkan dapat digambarkan pola hubungan keuangan pusat daerah berdasarkan UU No.25/1999.

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah tipe deskriptif, kerangka pemikiran yang digunakan adalah konsep otonomi daerah, hubungan keuangan pusat dan daerah, keuangan daerah dan implementasi kebijakan. Dengan teknik analisis data kualitatif. Sumber data terdiri dari dua macam, yang pertama hasil wawancara, kedua adalah dari studi pustaka terhadap buku, koran maupun dokumen yang berkenaan dengan hubungan keuangan pusat dan daerah.

Dalam penelitian ini peneliti menemukan kekecewaan besar dari pemerintah daerah mengenai pembagian bagi hasil migas. Dampaknya adalah pembentukan FKDPM (Forum Konsultasi Daerah Penghasil Migas) yang merupakan bentuk dari kekecewaan yang terakumulasi dari daerah-daerah penghasil migas yang salah satunya adalah Kabupaten Tuban.

Maka dari itu perlu adanya perubahan sistem dan mekanisme Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah hendaknya dilihat sebagai bagian dari reformasi hubungan keuangan pusat-daerah yang menyeluruh sebagai implikasi dari otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Reformasi Hubungan Keuangan Pusat-Daerah disamping bertujuan untuk mengubah sistem dan mekanisme hubungan keuangan pusat-daerah. Perubahan pengaturan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dengan segala implikasinya seperti yang dijelaskan di atas, harus dapat diimbangi oleh pemberdayaan atau peningkatan kemampuan Pemerintah Daerah, sehingga Pemerintah Daerah mampu berperan aktif dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Hal terpenting lainnya yang juga akan sangat mempengaruhi keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan UU Pemerintahan Daerah dan UU Perimbangan Keuangan yang baru adalah efektivitas fungsi pengawasan yang menjadi tugas dan tanggung jawab dari DPRD. Perubahan sistem desentralisasi pemerintahan ke arah model demokrasi sebagaimana tercermin dalam UU No. 25/1999 memerlukan dukungan desentralisasi fiskal yaitu hubungan keuangan pusat-daerah yang bersifat demokratis pula dengan tidak mengabaikan prinsip kesatuan negara bangsa.

Kata kunci :Perimbangan Keuangan Pusat Daerah, Pengembangan Potensi Keuangan Daerah, Implementasi Kebijakan.